

Daerah Lereng Merapi Kekeringan, BPBD Klaten Mulai Dropping Air

KLATEN (IM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mulai melaksanakan dropping air bersih untuk tiga desa yang mengalami kekeringan akibat kemarau ini. "Sejak Senin (10/6), kami mulai melaksanakan dropping air ke tiga desa di daerah lereng Gunung Merapi, Kecamatan Kemalang, Klaten," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten, Syahrana.

Ketiga desa itu, Desa Sidorejo, Desa Kendalsari, dan Desa Tologowatu. Total dropping air ke tiga desa itu delapan tangki masing-masing berkapasitas 5.000 liter.

Menurut Syahrana, memasuki kemarau ini ada beberapa desa yang mengajukan permintaan dropping air. Setelah tiga desa di Kecamatan Kemalang itu, dropping air berikut ke Desa Bandungan, Kecamatan Jatimom.

"Dropping air ke tiga desa di Kecamatan Kemalang, hari ini, diprioritaskan ke tempat ibadah untuk persiapan Idul Qurban 1445 H/2024 M. Seperti Masjid Al Falah dan Masjid Al Hikmah di Desa Sidorejo," katanya.

Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau tahun ini, BPBD Klaten memperoleh dukungan operasional untuk kegiatan dropping air hingga 500 tangki dengan anggaran sekitar Rp250 juta dari APBD 2024.

Sebelumnya, BPBD Klaten 2023 menyalurkan bantuan air sebanyak 964 tangki. Jumlah ini termasuk 240 tangki bantuan dari CSR dan elemen masyarakat. Ada 26 desa di 10 kecamatan yang

kekeringan tahun lalu.

Kekeringan tahun lalu terjadi di Kecamatan Bayat meliputi 10 desa, Kemalang (5), Cawas (1), Wedi (1), Jatimom (2), Karangdowo (3), Trucuk (1), Prambanan (1), Karangnongko (1), dan Gantiwarno (1). "BPBD Klaten siap menghadapi ancaman kekeringan tahun ini. Untuk pelaksanaan dropping air, empat armada tangki air pun siap dioperasikan. Terlebih ada dukungan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Klaten," ujar Syahrana.

Anggota takmir Masjid Al Hikmah, Sukiyo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPBD Klaten yang telah menyalurkan bantuan air untuk kebutuhan jamaah masjid di Dukuh Tawang, Desa Sidorejo, tersebut.

"Warga Dukuh Tawang kini mulai kesulitan air bersih. Karena, air di bak penampungan air hujan sudah kering. Untuk kebutuhan sehari-hari warga membeli air Rp250.000-Rp300.000 per tangki isi 6.000 liter," katanya.

Kepala Urusan Perencanaan Desa Sidorejo, Julyanto, membenarkan sebagian dari 1.450 KK di desanya kini mulai kesulitan air bersih. Untuk mengatasi kebutuhan air sehari-hari, warga membeli air dari tangki swasta.

"Harga air di Desa Sidorejo wilayah bawah Rp200.000 per tangki, sedangkan di atas Rp300.000-Rp350.000 per tangki. Maka, kami terima kasih dengan adanya dropping air dari BPBD Klaten. Ini sangat membantu warga," ujarnya. ● **pra**

Presiden Jokowi Apresiasi Penanganan Anak Stunting di Kota Bogor

BOGOR (IM) - Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari menyebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan stunting di wilayahnya. "Tadi tiga kata yang diucapkan, 'bagus pak, bagus,'" kata Hery usai mendampingi Jokowi di Posyandu Kusumawijaya, Kelurahan Kebon Pedes, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/6).

Menurut Hery, target prevalensi stunting dari Survei Kesehatan Indonesia sebesar 18,8 persen. Sedangkan prevalensi stunting di Kota Bogor berada di angka 18,2 persen atau sudah melebihi target Survei Kesehatan Nasional (SKI).

"Target kita sesuai target dari SKI, sebenarnya sudah terlewati. Tetapi targetnya kita zero stunting, insya Allah dalam dua tahun ini," ujarnya kala mendampingi Jokowi meninjau program Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting.

Hery juga melapor soal inovasi dan proses yang dijalankan Pemkot Bogor dalam mencegah dan menurunkan angka stunting. Dia menyampaikan, ada lima langkah upaya penurunan stunting di Kota Bogor.

Termasuk juga, kata Hery, menargetkan 100 persen balita ditimbang dan diukur. Sementara ibu hamil dan calon pengantin dilakukan skrining melalui program Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting ini selama Juni 2024.

"Targetnya 100 persen (balita, ibu hamil, dan calon pengantin). Kalau jumlah balita kita balita se-Kota Bogor 2.000 sekian," kata Hery.

Menurut Ketua Pokja 4 PKK Kota Bogor, Meira Sophia, kegiatan itu melibatkan

proses yang terpadu mulai dari pendaftaran hingga penyuluhan dengan tujuan mengoptimalkan pencegahan stunting.

"Alhamdulillah masyarakat sangat antusias, bahkan sebetulnya ingin berbondong-bondong datang ke tempat ini untuk bertemu dengan Bapak Presiden," ujarnya menyampaikan antusiasme warga mengikuti program di posyandu.

Kegiatan di Posyandu Wijaya Kusuma menasar sedikitnya 105 bayi dan balita, calon pengantin, dan sejumlah ibu hamil.

Meira berharap dengan adanya gerakan serentak ini, angka prevalensi stunting di Tanah Air bisa diturunkan secara signifikan.

"Dengan adanya gerakan serentak ini diharapkan pengukuran yang serentak, kemudian intervensi yang serentak di semua lini dan terpadu itu dapat menurunkan angka stunting yang kemudian akan menciptakan generasi yang baik di tahun 2045," katanya.

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana mengunjungi Posyandu Kusumawijaya di Kelurahan Kebon Pedes, Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa (11/6). Keduanya meninjau pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lainnya pada ratusan balita, serta kesehatan pada ibu hamil dan calon pengantin.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmud, dan Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari. ● **pra**

8 | Nusantara



GALUH ETHNIC CARNIVAL DI CIAMIS

Foto udara peserta mengikuti Galuh Ethnic Carnival pada perayaan hari jadi Ciamis ke-382 di Halaman Pendopo Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (11/6). Kegiatan itu digelar sebagai salah satu media promosi memperkenalkan seni budaya, industri kreatif dan perdagangan dengan menampilkan ciri khas potensi daerah.

Laporan Anggaran Samisade Lambat, Anggaran untuk 2024 Terhambat

Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengaku bakal mengevaluasi kinerja jajarannya, untuk mencari titik masalah yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah dalam hal penyerapan anggaran Samisade.

CIBINONG (IM) - Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran bantuan keuangan infrastruktur desa atau satu milyar satu desa (Samisade) berjalan lambat.

Hingga, sampai saat ini, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDD) belum mengucurkan anggaran Samisade tahun anggaran 2024.

Sementara itu, dari sisi penyerapan anggaran. Samisade atau DPMD turut menyumbang rendahnya angka serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang baru sekitar 27 persen.

"Anggaran Samisade tahun anggaran 2024 belum cair karena laporan pertanggungjawabannya pada tahun sebelumnya belum beres, saya minta Camat membantu DPMD dan turut membina pemerintah desanya," kata Asmawa Tosepu kepada wartawan, Selasa (11/6).

Asmawa Tosepu mengaku bakal mengevaluasi kinerja

jajarannya, untuk mencari titik masalah yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah dalam hal penyerapan anggaran Samisade.

Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah menuturkan bahwa beberapa pemerintah kecamatan masih memverifikasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Samisade.

"Anggaran Samisade tahun anggaran 2024 memang banyak yang belum cair, karena banyak yang laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Samisadenya yang masih diverifikasi dan lainnya masih dalam

permohonan anggaran yang sama tahun anggaran 2024 di BPKAD," tutur Renaldi Yushab Fiansyah.

Ia pun masih optimistis, jika anggaran Samisade tahun anggaran 2024 bisa segera dilaksanakan secara tepat waktu atau sebelum akhir tahun ini.

"Walaupun anggaran Samisade nilainya ratusan juta hingga Rp 1 miliar perdesa, tetapi alokasinya dibagi ke beberapa titik hingga pelaksanaannya tidak butuh waktu lama yaitu 45 hingga 60 hari, hingga bisa diselesaikan sebelum akhir tahun," tukas Renaldi Yushab Fiansyah. ● **gio**

JIKA BISA TINGKATKAN PRODUKSI

Pj Gubernur Bey Optimistis Jabar Jadi Sentra Bawang Merah

BEKASI (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey Machmudin menghadiri Panen Raya Komoditas Bawang Merah di Lahan Pertanian Terpadu Korem 051/WKT, Kabupaten Bekasi, Selasa (11/6). Hadir juga dalam acara tersebut Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Menurut Bey, Pemprov Jabar terus berupaya me-

ningkatkan produksi dan produktivitas bawang merah. Selain bawang merah, Bey mendorong produksi padi lebih dimasifkan hingga dapat menyejahterakan masyarakat. "Kami ingin lebih masif lagi, agar produksi pangan khususnya padi lebih masif dan lebih tersebar ke seluruh Indonesia, sehingga akan menekan angka inflasi," ujar Bey.

Bey optimistis jika dalam setahun bisa melakukan panen sebanyak dua sampai empat kali, Jabar dapat menjadi

sentra bawang terbesar di Indonesia. "Kalau memang cocok, dan bisa dua atau empat kali (panen) dalam setahun, jadi kenapa tidak, jika kita bisa. Kita jadikan sentra bawang terbesar di Tanah Air," katanya.

Bey pun berharap dengan berbagai upaya yang dilakukan, produksi dan produktivitas bawang merah di Jabar dapat terus meningkat. Hal itu tentunya akan membawa manfaat bagi para petani bawang merah dan masyarakat

kat Jabar.

Bey mengatakan, bawang merah memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi salah satu penyumbang inflasi di Indonesia. Karenanya, peningkatan produksi bawang merah menjadi salah satu fokus utama pemerintah, baik di tingkat

pusat maupun daerah.

"Tentunya ini bersama masyarakat dan petani. Kita tahu bahwa bawang merah ini juga bisa menjadi penyumbang inflasi, dengan adanya panen ini akan menekan dan saya mengapresiasi," kata Bey. ● **pra**

Pemkab Bogor Gelar Pelayanan KB Gratis Program Sejuta Akseptor

BOGOR (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bekerjasama dengan RSAU dr. M. Hassan Toto, Lanud Atang Sendjaja menggelar layanan KB gratis program sejuta akseptor, di Kemang, Kabupaten Bogor.

Kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 dan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-542 tahun 2024.

Kegiatan dilaksanakan di RSAU dr. M. Hassan Toto, Kecamatan Kemang, Senin (10/6), dan mendapatkan antusias dari masyarakat yang berasal dari 40 Kecamatan se-Kabupaten Bogor.

Untuk diketahui, untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas maka perlu dilaksanakan program KB untuk mengatur kehamilan yang diinginkan, menjaga kesehatan ibu, bayi dan anak, meningkatkan akses dan kualitas informasi KB dan kesehatan reproduksi, meningkatkan partisipasi

KB pria dan mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

Dengan demikian, kegiatan ini untuk kesekian kalinya digelar bersama Pemkab Bogor, dan hingga saat ini pelaksanaannya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran.

"Semua pasien yang tadi dilakukan operasi sudah mulai siuman dan bisa beraktifitas kembali, serta bisa dipulangkan ke rumah masing-masing," ujar Hendro Yulicanto.

Ia menambahkan, kegiatan ini melibatkan Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi, dokter kandungan, dokter Obgyn, dan yang paling penting adalah dokter anestesi.

Disampaikan, bahwa kegiatan ini juga melibatkan dokter emergensi medik. Karena beberapa pasien ada yang darah tinggi, ada yang gula darahnya tinggi, ini kita perlu siapkan dengan baik.

"Kami juga melibatkan banyak dokter umum, kemudian juga perawat-perawat guna menangani pasien-pasien ini," ujarnya. ● **gio**

Pj. Bupati Bogor Perintahkan Jajarannya Optimalkan Rest Area Gunung Mas Puncak



Rapat pemanfaatan rest area Puncak. Pj Bupati Bogor perintahkan jajarannya agar mengoptimalkan rest area Gunung Mas Puncak.

BOGOR (IM) - Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu memimpin rapat pembahasan optimalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak, di Ruang Rapat Bupati Bogor, Cibinong, Senin (10/6).

Pada kesempatan tersebut, Asmawa memerintahkan jajarannya untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan Rest Area Gunung Mas Puncak.

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menjelaskan, pengelolaan rest area ini menjadi sangat penting, karena sudah selesai dibangun namun belum bisa dimanfaatkan secara optimal.

Pj Bupati menegaskan, rest area tersebut sangat representatif dengan fasili-

tas yang sangat lengkap sehingga sudah bisa dioptimalkan.

"Saya ingin sebelum Pilkada, atau dalam waktu dekat ini bisa dilakukan optimalisasi pemanfaatannya. Hari ini kita berdiskusi, apa saja yang harus kita lakukan terkait pemanfaatan Rest Area Gunung Mas Puncak, di antaranya PT. Sayaga Wisata yang diberikan tugas untuk mengelola," jelas Asmawa.

Asmawa mengungkapkan, lewat rapat ini ia berharap bisa satu suara untuk merealisasikan pemanfaatan Rest Area Gunung Mas Puncak. Sehingga kita memiliki komitmen bersama untuk mengawal kebijakan optimalisasi pemanfaatan-

nya, katanya.

"Termasuk rencana penataan kantong parkir, penataan bangunan pedagang kaki lima yang ada di pinggir jalan untuk bisa masuk ke rest area tersebut," ungkap Asmawa.

Hadir pada rapat tersebut, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Direktur Utama PT. Sayaga Wisata, perwakilan Forkopimda, perwakilan Denpom Divif 1 Kostrad, perwakilan Lanud ATS, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Camat bersama Forkopimcam Cisarua. ● **gio**

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bersama ini PT DWIWARNA SENTOSA RIA ("Perseroan") yang berkedudukan di Jl. H. Samali No.89, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengumumkan rencana perubahan pengendalian Perseroan melalui pengambilan saham baru yang akan diterbitkan dalam Perseroan oleh pihak lain. Sehubungan dengan hal tersebut, komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan akan berubah menjadi 20% (dua puluh persen) dimiliki oleh pemegang saham lama dan 80% (delapan puluh persen) dimiliki oleh pemegang saham pengendali baru yang akan berlaku efektif sejak tanggal keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan atau tanggal keputusan para pemegang saham Perseroan di luar RUPS yang akan diambil paling cepat 30 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Atas rencana perubahan pengendalian Perseroan tersebut, kreditor atau pihak-pihak lain yang berkepentingan Perseroan dapat menyampaikan keberatan berikut atasannya secara tertulis kepada Perseroan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 12 Juni 2024.
PT Dwiwarna Sentosa Ria
Direksi



Pemkab Bogor menggelar KB gratis program sejuta akseptor.